

**KOORDINASI PEMERINTAH DALAM UPAYA MITIGASI BANJIR DI  
KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA  
(Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan  
Umum Tata Ruang)**

**Oleh  
Widia Ierdiana  
NIM 210501015**

**Abstrak**

Koordinasi adalah proses mengatur suatu organisasi atau kegiatan agar aturan dan tindakan yang dilakukan bisa selaras dan tidak saling bertentangan. Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga menjadi daerah yang masih sering terjadi banjir sehingga masalah ini sudah seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, dengan itu untuk mengurangi risiko perlu dilakukan melalui konsep koordinasi pemerintah terutama antar pihak yang terlibat secara langsung dalam mitigasi bencana banjir secara teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lingga dalam mitigasi banjir terutama pada wilayah Kecamatan Singkep serta hambatan yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada teori koordinasi Harold Koontz yang menekankan pentingnya rencana kerja, pertemuan, komunikasi dan pembagian tugas. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi belum berjalan secara optimal. Rencana kerja kedua instansi belum benar-benar menyatu, sehingga program masih berjalan masing-masing sesuai kewenangan. Tujuan dari koordinasi ini hanya karena keduanya sama-sama memiliki peran dalam mitigasi bencana banjir, sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dan Perda Lingga Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Pertemuan keduanya sebatas saling menyampaikan dan menginformasikan upaya mitigasi yang akan dilakukan sesuai rencana kerja. Meskipun komunikasi dan pembagian tugas telah berjalan sesuai fungsi masing-masing, tetapi ini belum mampu menyatukan tindakan secara maksimal, terutama dalam menjawab keluhan masyarakat dan menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh karena kurangnya pemerataan program mitigasi terutama dalam hal sosialisasi dan pembangunan drainase di beberapa kelurahan yang terdampak. Adapun hambatan utama yang ditemukan dalam pelaksanaan koordinasi yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Ketiga faktor tersebut memperlemah efektivitas penanganan banjir dan menghambat terciptanya koordinasi yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Koordinasi Pemerintah, Mitigasi Banjir, BPBD, PUTR.

# **GOVERNMENT COORDINATION IN FLOOD DISASTER MITIGATION EFFORTS IN SINGKEP DISTRICT, LINGGA REGENCY**

**(Study on Regional Disaster Management Agency and Public Works and  
Spatial Planning Agency)**

**By  
Widia Ierdiana  
NIM 210501015**

## **Abstract**

Coordination is the process of organizing an organization or activity so that the rules and actions taken are in harmony and do not conflict with each other. Singkep District, Lingga Regency is an area that still frequently experiences flooding so this problem should be a serious concern for all parties, therefore to reduce the risk it is necessary to do it through the concept of government coordination, especially between parties directly involved in technical flood disaster mitigation. This study aims to determine how the coordination process between the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and the Public Works and Spatial Planning Agency (PUTR) of Lingga Regency in flood mitigation, especially in the Singkep District area and the obstacles they face. This study used a qualitative method, referring to Harold Koontz's coordination theory, which emphasizes the importance of work plans, meetings, communication, and task allocation. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results showed that coordination between agencies was not yet optimal. The work plans of both agencies were not fully integrated, so each agency's program was still running according to its respective authority. The purpose of this coordination was simply because both agencies had a role in flood disaster mitigation, in accordance with the authority of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management and Lingga Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Disaster Management Agency (BPBD). Meetings between the two agencies were limited to communicating and informing each other about mitigation efforts to be carried out according to the work plan. Although communication and task allocation had been carried out according to their respective functions, this had not been able to optimally integrate actions, especially in responding to public complaints and resolving the flood problem comprehensively due to the lack of equitable distribution of mitigation programs, especially in terms of socialization and drainage construction in several affected villages. The main obstacles encountered in implementing coordination were budget constraints, a lack of human resources, and low community participation. These three factors weaken the effectiveness of flood management and hinder the creation of planned, integrated, and sustainable coordination.

**Keywords:** Government Coordination, Flood Mitigation, BPBD, PUTR.